

DETAIL RUANG LINGKUP
INSTALASI TELEKOMUNIKASI
IN002

Sifat	:	Spesialis
Klasifikasi	:	Instalasi
Kode Subklasifikasi	:	IN002
Kode KBLI	:	43212 (Instalasi Telekomunikasi)
Ruang Lingkup Kegiatan	:	Kelompok ini mencakup kegiatan pekerjaan pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung, seperti pemasangan antena. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi dan Instalasi telekomunikasi di bangunan gedung dan bangunan sipil.

BUJKN / BUJK PMA

1. Struktur Permodalan :

- a. BUJKA Non-ASEAN paling banyak memiliki 67% (enam puluh tujuh persen) dari total saham pada BUJK PMA pemohon sertifikasi.
- b. BUJKA ASEAN paling banyak memiliki 70% (tujuh puluh persen) dari total saham pada BUJK PMA pemohon sertifikasi.

2. Kriteria teknis penanam modal dalam negeri :

- a. BUJKN Kualifikasi Besar yang dibuktikan dengan SBU yang masih berlaku.
- b. Memiliki kegiatan usaha yang sama dengan BUJKA PMA yang dibuktikan dengan SBU yang masih berlaku.

3. Kriteria teknis penanam modal asing :

- a. BUJKA Kualifikasi Besar yang dibuktikan dengan sertifikat, izin usaha, atau dokumen pendukung lainnya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di negara asal.
- b. Dalam hal instansi di negara asal tidak dapat menerbitkan dokumen yang menyatakan BUJKA adalah badan usaha jasa konstruksi kualifikasi besar, BUJKA harus memiliki kemampuan keuangan paling sedikit Rp 35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar) untuk kegiatan usaha Pekerjaan Konstruksi, yang dibuktikan dengan laporan keuangan periode terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik di negara asal.
- c. Mempunyai sertifikat bidang jasa konstruksi yang disetarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mempunyai kegiatan usaha yang sama dengan BUJKN penanam modal dalam negeri yang dibuktikan dengan sertifikat, izin usaha, atau dokumen pendukung lainnya.

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal Pasal 11 Ayat (1) :

Ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal terhadap Bidang Usaha yang diatur dalam tidak berlaku bagi Penanaman Modal yang telah disetujui sebelum Peraturan Presiden ini diundangkan sebagaimana tercantum dalam perizinan berusaha

Khusus PMA baru : Lampirkan NIB terbaru di upload bersamaan dengan surat pernyataan tanggungjawab mutlak

Tenaga Kerja Konstruksi :

- | | |
|----|---|
| 1. | 1 (satu) orang Penanggungjawab Badan Usaha (PJBU) tidak boleh merangkap PJTBU |
| 2. | 1 (satu) orang Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) memiliki :
- SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 8 (delapan)
- SKK Klasifikasi Sipil dan Subklasifikasi Gedung atau;
- SKK Klasifikasi Mekanikal dan Subklasifikasi Bangunan Menara / Teknik Mekanikal |
| 3. | 1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap sebagai 5 PJSKBU dalam 1 (satu) Klasifikasi yang sama dengan ketentuan :
- SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 7 (Tujuh)
- SKK Klasifikasi Sipil dan Subklasifikasi Gedung atau;
- SKK Klasifikasi Mekanikal dan Subklasifikasi Bangunan Menara / Teknik Mekanikal |

Kemampuan Keuangan : Paling Sedikit Aset Rp. 5.000.000.000,-

1. Lampirkan neraca badan usaha dan laporan audit kantor akuntan publik yang teregistrasi di Kementerian Keuangan <https://pppk.kemenkeu.go.id/in/post/daftar-kantor-akuntan-publik-aktif>

Peralatan Konstruksi :

1. Kepemilikan alat di input diaplikasi SIMPK : <https://simpk.pu.go.id/>

<ul style="list-style-type: none"> • Paling sedikit 2 (dua) Alat • Alat yang dapat dirangkap pada Subklasifikasi lain dalam 1 (satu) klasifikasi yang sama 	<i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, welding machine, dump truck, Long Arm Excavator/Excavator, generator set, mobile crane, pile driving machine, Hat Bed Truck/Flat Bed Truck/Trailer, bored pile machine, Crawler Crane (Service Crane)/Crawler Crane, pile hammer, horizontal directional drilling (HDD), stringing machine, dan cable roller.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Permen PUPR No.6 Tahun 2021 • Surat Edaran Kementerian PU No.BK0402-Ku/18 Tanggal 25 Juli 2025
	<i>bulldozer, clamshell, cold milling machine, Crawler Crane (Service Crane)/Crawler Crane, crew boat, diesel hammer, forklift, formwork pier head, gantry launcher, generator set, gondola, Hydraulic Hammer/Hydraulic Breaker/ Rock Drill, hydraulic drilling machine, marking paving machine, ponton material supply, pulvi mixer, purifier machine, vibrating rammer, vibrating tamper, video camcorder (handycam)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Permen PUPR No.8 Tahun 2022 • Surat Edaran Kementerian PU No.BK0402-Ku/18 Tanggal 25 Juli 2025
	<i>concrete vibrator</i>	Surat Edaran Kementerian PU No.BK0404-DK/880 Tanggal 9 Juli 2025

Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) :

1.	Surat Pernyataan Komitmen 2 tahun
2.	Dokumen penerapan SMAP
3.	Sertifikat ISO 37001-2016 yang dikeluarkan oleh Lembaga sertifikasi terakreditasi oleh dari KAN dan/atau Anggota IAF, APAC atau MLA
4.	Kepemilikan lembar konfirmasi pengisian Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) yang didapatkan setelah melengkapi persyaratan dan dinyatakan sesuai pada aplikasi PANCEK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan nilai minimal terjawab 42 (empat puluh dua) dari 59 (lima puluh Sembilan) indikator atau minimal 70% (tujuh puluh persen)



ASKONAS
PT. ANDALAN SERTIFIKASI KONTRAKTOR (PT. ASKONAS)

DETAIL RUANG LINGKUP
INSTALASI TELEKOMUNIKASI
IN002

BUJKA		
Tenaga Kerja Konstruksi :		
1.	1 (satu) orang Penanggungjawab Badan Usaha (PJBU) tidak boleh merangkap PJTBU	
2.	1 (satu) orang Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) memiliki <ul style="list-style-type: none"> - SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 9 (sembilan) - SKK Klasifikasi Sipil dan Subklasifikasi Gedung atau; - SKK Klasifikasi Mekanikal dan Subklasifikasi Bangunan Menara / Teknik Mekanikal 	
3.	1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap sebagai 5 PJSKBU dalam 1 (satu) Klasifikasi yang sama dengan ketentuan : <ul style="list-style-type: none"> - SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 8 (delapan) - SKK Klasifikasi Sipil dan Subklasifikasi Gedung atau; - SKK Klasifikasi Mekanikal dan Subklasifikasi Bangunan Menara / Teknik Mekanikal 	
Kemampuan Keuangan : Paling Sedikit Aset Rp. 10.000.000.000,-		
1.	Lampirkan neraca badan usaha dan laporan keuangan audit kantor akuntan publik negara asal	
2.	Nilai kurs dikonversi ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs BI sesuai tanggal permohonan sertifikasi	
Peralatan Konstruksi :		
1.	Kepemilikan alat di input diaplikasi SIMPK : https://simpk.pu.go.id/	
<ul style="list-style-type: none"> • Paling sedikit 5 (lima) Alat • Alat yang dapat dirangkap pada Subklasifikasi lain dalam 1 (satu) klasifikasi yang sama 	<i>concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, welding machine, dump truck, Long Arm Excavator/Excavator, generator set, mobile crane, pile driving machine, Hat Bed Truck/Flat Bed Truck/Trailer, bored pile machine, Crawler Crane (Service Crane)/Crawler Crane, pile hammer, horizontal directional drilling (HDD), stringing machine, dan cable roller.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Permen PUPR No.6 Tahun 2021 • Surat Edaran Kementerian PU No.BK0402-Ku/18 Tanggal 25 Juli 2025
	<i>bulldozer, clamshell, cold milling machine, Crawler Crane (Service Crane)/Crawler Crane, crew boat, diesel hammer, forklift, formwork pier head, gantry launcher, generator set, gondola, Hydraulic Hammer/Hydraulic Breaker/ Rock Drill, hydraulic drilling machine, marking paving machine, ponton material supply, pulvi mixer, purifier machine, vibrating rammer, vibrating tamper, video camcorder (handycam)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Permen PUPR No.8 Tahun 2022 • Surat Edaran Kementerian PU No.BK0402-Ku/18 Tanggal 25 Juli 2025
	<i>concrete vibrator</i>	Surat Edaran Kementerian PU No.BK0404-DK/880 Tanggal 9 Juli 2025
Sistem Manajemen Anti Penyuaan (SMAP) :		
1.	Surat Pernyataan Komitmen 1 tahun	
2.	Dokumen penerapan SMAP	
3.	Sertifikat ISO 37001-2016 yang dikeluarkan oleh Lembaga sertifikasi terakreditasi oleh dari KAN dan/atau Anggota IAF, APAC atau MLA	
4.	Kepemilikan lembar konfirmasi pengisian Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) yang didapatkan setelah melengkapi persyaratan dan dinyatakan sesuai pada aplikasi PANCEK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan nilai minimal terjawab 42 (empat puluh dua) dari 59 (lima puluh Sembilan) indikator atau minimal 70% (tujuh puluh persen)	